

HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt

Baubau Post

Baubaupost.com

Setiap Saat Adalah Berita

Senin
08 Januari 2024

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

Capai Level Aman 2,48 Persen, Kota Baubau Berhasil Atasi Inflasi Tinggi

Baubau Peroleh Nilai B Dari Kemendagri Dalam Pengukuran IPKD

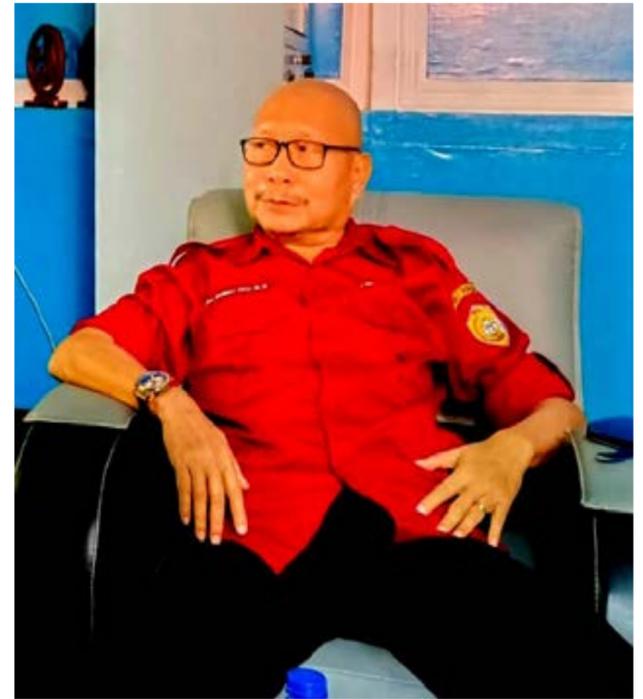
PEMANTAUAN HARGA KOMODITAS POKOK KOTA BAUBAU
(((REAL TIME)))

SCAN SAYA

MELIHAT HARGA PASAR

#BAUBAUBEKERJABERSAMA

Dr. MUH. RASMAN MANAFI, S.P., M.Si
Pj. Wali Kota Baubau



Pewarta: Andina L

Kepala Balitbang Kota Baubau Drs Rahmad Tuta, M.Si membenarkan pelaksanaan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2023, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri menetapkan Kota Baubau berhasil melakukan penginputan memperoleh nilai B.

BAUBAU, BP-Berke-
naan pelaksanaan Pengu-
kuran Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah (IPKD)
Tahun 2023, Kementer-
ian Dalam Negeri melalui
Badan Strategi Kebijakan
Dalam Negeri menetapkan
Kota Baubau berhasil
melakukan penginputan
memperoleh nilai B.

Bulan Desember 2023,
data inflasi yang diri-
lis Badan Pusat Statistik
per 3 Januari 2024, angka
Inflasi di Kota Bau-

Lanjutkan ke Hal: 7

Lanjutkan ke Hal: 7

Laporan: Ardi

BAUBAU---Kerja keras Pj. Wali Kota Baubau Dr. Muh. Rasman Manafi, SP, M.Si dan jajarannya dalam mengendalikan harga di pasaran dan kesediaan bahan pokok strategis kini berdampak pada kestabilan perekonomian daerah dan membuahkan hasil. Inflasi di dua bulan terakhir tahun 2023, yakni November dan Desember terus menunjukkan kestabilan dan membaik.

BKPSDM Baubau Persiapkan Lelang Tiga Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kosong

Sekda Buton Pimpin Apel HAB ke 78



Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau melalui Badan Kepegawaian Pengembangan

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Baubau kini tengah mempersiapkan lelang tiga jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lo-

wong yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Inspektorat dan Dinas Pendidikan dan

Lanjutkan ke Hal: 7

Pewarta: Alyakin

BUTON, BP-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton, Asnawi Ja-

maludin, SPd. MSi memimpin Apel Hari Amal Bakti (HAB) ke-78 Kementerian Agama (Ke-

menag) tingkat Kabupaten Buton di Halaman Kantor Kemenag Buton,

Lanjutkan ke Hal: 7



**SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA
PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)**

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post (www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi per Tanggal 30 Desember 2022



Capai Level Aman 2,48 Persen, Kota Baubau Berhasil Atasi Inflasi Tinggi



baubau menjauh dari 10 besar nasional, yang menunjukkan kestabilan secara nasional. Angka Inflasi di Kota Baubau di Bulan Desember 2023, diurai dari Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 117,61 poin sementara di level Nasional sebesar 116,56 poin. Untuk Inflasi perbandingan tahunan (YoY) sebesar 2,48 persen di bawah angka nasional sebesar 2,61 persen, sementara inflasi perbandingan bulanan (MoM) Baubau sebesar 1,01 persen, namun masih di atas angka Nasional sebesar 0,41 persen.

“Alhamdulillah, angka inflasi ini cenderung membaik, karena sudah di bawah angka nasional dan keluar dari 10 besar nasional,” ujar Kabag Ekonomi Setda Kota Baubau, Safrin, ST.Pr. dalam rilis informasinya kepada Dinas Ko-

munikasi dan Informatika Kota Baubau, Kamis hari ini (4/1).

Disebutkan dalam Data BPS, dari 90 Kota Indeks Harga Konsumen (IHK), 5 Kota mengalami deflasi dan 85 Kota masih mengalami inflasi. Deflasi terdalam sebesar -0,67% diperoleh Kota Meulaboh (Aceh), Deflasi terendah sebesar -0,03% oleh Kota Metro (Lampung), untuk Inflasi Tertinggi oleh Kota Ternate sebesar 1,64% dan Inflasi Terendah sebesar 0,02% jatuh ke Kota Bandar Lampung.

Sementara Kota Baubau berada di urutan 30 besar kota-kota di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Sementara jika digabung secara nasional, juga menjauh dari kelompok 50 besar.

Meski demikian, penyumbang inflasi di Kota Baubau secara terinci berasal Ikan Layang/Beng-

gol, Cabai Rawit, Ikan Selar/Ikan Tude, Bawang Merah, Ikan Baronang, Ikan Katamba, Tomat dan Gula Merah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau H. Andi Hamzah Mahmud, S.Sos., M.Si mengapresiasi langkah-langkah strategis Pj. Wali Kota Baubau dalam memantau, mengendalikan harga dan ketersediaan bahan pokok strategis, yang secara riil time terantau secara akurat langsung dari lapangan setiap hari melalui aplikasi Safikiri.

“Wali Kota Baubau mengingatkan kepada kita semua, agar jaja-ran Pemkot Baubau tetap mawas dengan pergerakan harga yang setiap waktu bisa berubah, karena pasokan yang juga cenderung tergantung kondisi,” kata Andi Hamzah mengutip arahan Pj Wali

Kota Baubau.

Hal lain yang diungkap berkaitan dengan percepatan belanja pemerintah di triwulan pertama, yang dimaksudkan agar dapat mengintervensi perputaran ekonomi di daerah. “Sebab biasanya di bulan-bulan awal setiap tahun, uang yang berputar di daerah masih minim karena belanja pemerintah belum berjalan normal. Ini harus diantisipasi agar tidak berdampak pada terjadinya inflasi, termasuk berpengaruh pada tingkat daya beli masyarakat,” kata Andi Hamzah.

Kadis Kominfo ini juga meminta warga memantau perkembangan harga melalui aplikasi Safikiri (www.safikiri.baubaukota.go.id), karena data setiap hari update di sana berdasarkan laporan harian petugas pemerintah. (*)

Sekda Buton Pimpin Apel HAB ke 78

Rabu 3 Januari 2024 pagi.

Apel Peringatan HAB ke-78 yang mengangkat Tema Indonesia Hebat Bersama Umat tersebut, Sekda Buton berkesempatan secara langsung menjadi Inspektur Upacara HAB ke-78. Pada momen tersebut, Sekda Buton membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia.

Dalam amanatnya diingatkan setiap tahun baru, setiap insan Kemenag memiliki makna baru Dimana Kemenag dilahirkan pada awal tahun yaitu 3 Januari 1946. Artinya setiap memasuki tahun baru kita harus memiliki spirit ganda yang muncul dari pergantian tahun dan peringatan hari lahir Kemenag.

Mantan Kadis Sosial ini melanjutkan spirit ganda ini harus diwujudkan dalam bentuk amal bakti yang semakin mendalam dan paripurna, hari amal tentu tidak semata hanya nama tetapi di dalamnya terkandung harapan dan tekad untuk mencurahkan pengabdian kita kepada seluruh umat beragama.

“Mari tingkatkan semangat pengabdian dan perjuangan kita

mewujudkan segala cita dari dibentuknya Kementerian Agama,” ajaknya.

Dikatakan Sekda, sebagai institusi yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pendidikan keagamaan, tugas Kementerian Agama tidaklah ringan di antara tugas berat kita adalah menjaga harmoni kehidupan beragama sebagai salah satu pilar kerukunan nasional.

“Tugas berat ini dilaksanakan di antaranya dengan memberikan layanan yang adil, transparan dan akuntabel untuk seluruh umat beragama, selain itu juga memiliki tugas untuk membangun karakter bangsa melalui pendidikan agama, karena bekal agama yang moderat adalah fondasi kokoh dalam mewujudkan kerukunan umat beragama demi tercapainya tujuan pembangunan.

“Penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, kemandirian pesantren dan tahun kerukunan umat beragama adalah ikhtiar dalam memberikan layanan kepada seluruh umat,” lanjutnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa mo-

mentum Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama ini mengajak seluruh ASN di Kementerian Agama untuk meningkatkan spirit layanan kita kepada seluruh umat beragama.

“Indonesia hebat bersama umat bermakna bahwa kita harus kebersamai umat untuk menuju Indonesia yang hebat, wujud dari kebersamai umat ini adalah dengan memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada seluruh umat beragama,” Kata Sekda Buton

Sekda juga menghimbau para ASN yang hadir untuk dapat mewujudkan birokrasi yang melayani umat dengan senang hati, ruang gembira dan penuh pengabdian, jadikan pelayanan umat ini sebagai panggilan hati bukan semata kewajiban birokrasi karena jika pelayanan umat ini di landasi sebagai panggilan hati maka akan terwujud birokrasi yang inklusif, transparan dan berdampak.

“Selamat memperingati Hari Amal Bakti ke 78 Kementerian Agama, semoga Kementerian Agama terus jaya serta menjadi oase dan pelayanan umat yang terbaik,” tutupnya. (*)

Baubau Peroleh Nilai B Dari Kemendagri Dalam Pengukuran IPKD

data sehingga nilainya merah.

Di tahun 2023, Gubernur Sultra memerintahkan seluruh Kabupaten/Kota agar melakukan, memperhatikan IPKD untuk melakukan penginputan dengan baik sehingga di tahun 2023 sebelum Pemkot Baubau melakukan penginputan terlebih dahulu meminta bahwa Wali Kota membuat SK untuk tim pengelolaan indeks IPKD.

Tim diantaranya melibatkan BPKAD, Kominfo, BAPPEDA, INSPEKTORAT, dan BALITBANG untuk melakukan penginputan.

Menurut Rahmad Tuta, di dalam pengisian itu ada 6 dimensi yang harus diisi yakni dimensi yang pertama kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, dimensi kedua adalah

pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, dimensi ketiga transparansi pengelolaan keuangan daerah, dimensi ke empat penyerapan anggaran, dimensi kelima kondisi keuangan daerah dan dimensi ke enam opini BPK atas LKPD.

“Tentu semua dimensi ini banyak rangkaiannya sehingga kalau berkaitan dengan dimensi perencanaan maka yang bertanggung jawab adalah Bappeda, yang berkaitan dengan dimensi APBD berkaitan dengan keuangan yang bertanggung jawab BPKAD dimensi yang berkaitan dengan opini BPK adalah inspektorat semua ini akan di muat dalam

satu portal yang dimiliki oleh Dinas Kominfo. Jadi website ini ada yang memuat tentang penginputan dari pada IPKD ini. Dan kalau kita tidak mengisi di

situ berarti nol atau kosong. Jadi bisa dilihat semua orang dari website portal IPKD, yang lalu tidak ada sehingga kami tidak di nilai jadi untuk penilaiannya adalah penilaian kegiatan di tahun 2022,” ujar jurnalis.

Ditargetkan, tahun depan Kota Baubau merebut peringkat A. Syaratnya, perlu kolaborasi kuat Dinas Kominfo membantu menyebarluaskan ke website termasuk data-data yang ada di Bappeda, data keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah harus secepatnya di masukan ke website Kominfo karena itu ada nilainya.

“Sebenarnya Balitbang ini hanya diberi pengampu, diberikan tugas oleh Wali Kota untuk mengampu ini diberi tanggung jawab untuk mengkoordinir dinas-dinas terkait. (*)

BKPSDM Baubau Persiapkan Lelang Tiga Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kosong

Kebudayaan.

Dari ketiga Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang kosong tersebut maka untuk melakukan pengisian jabatan salah satu alternatifnya yakni melakukan seleksi terbuka atau melakukan pengisian jabatan dengan merotasi pimpinan SKPD. Dan agar lebih efisiensi anggaran dalam proses pengisian jabatan maka proses seleksinya diselenggarakan sekaligus untuk ketiganya.

Kepala BKPSDM Kota Baubau Ir Wa Ode Muhibbah Suryani, M.Si melalui Kepala Bidang Pengembangan dan Diklat La Ode Ab-

dul Rahman mengatakan, BKPSDM akan membentuk Panitia Seleksi (Pansel). Hanya saja, satu tempat yang kosong salah satunya adalah Inspektur daerah ini memiliki mekanisme yang berbeda pengisian jabatannya karena sebelum merencanakan atau mengajukan perencanaan pelaksanaan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) maka harus berkonsultasi dulu ke Irjen Kemendagri melalui Gubernur Sultra yang namanya konsultasi pembentukan Pansel Inspektur Daerah.

Saat ini BKPSDM Kota Baubau melakukan kon-

sultasi ke Irjen Kemendagri untuk mendapatkan rekomendasi pembentukan Pansel melalui Gubernur Sultra. Dan Gubernur Sultra sudah memberikan surat rekomendasi pada akhir Desember 2023. Sehingga, berdasarkan surat rekomendasi Gubernur Sultra tersebut maka BKPSDM mengajukan ke Irjen Kemendagri melalui aplikasi Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) yang per tanggal 3 Januari 2024 sudah dimatangkan.

“Jadi hari kerja tercepat kita langsung mengajukan permohonan me-

lalui aplikasi SIOLA Kemendagri itu. Ya syaratnya itu tadi surat Wali Kota yang dibuat untuk Gubernur, surat Gubernur, sama persyaratan lainnya seperti jadwal pelaksanaan, terus juga CV dari salah satu Pansel yang berpengalaman dari bidang pengawasan. Jadi kita kirimkan semua itu dan posisinya sekarang kita kirim per tanggal 3 Januari kemarin dan hari ini tanggal 4 Januari kita cek posisinya sudah diverifikasi dan dikatakan telah lengkap berkas. Setelah unit kerja dapat surat rekomendasinya, baru sampai ditahap itu saat ini,” ujarnya. (*)

Bawaslu Baubau Intens Jaga Netralitas ASN dan Logistik Pemilu



Ketua Bawaslu Kota Baubau Sarmin, S.Pd

Laporan: Amat Jr

BAUBAU, BP-Bawaslu Kota Baubau sejauh ini belum menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pilkada. Namun demikian, dalam rangka untuk pencegahan terhadap pelanggaran ASN, Bawaslu Kota Baubau intens membangun koordinasi dengan pemerintah daerah termasuk melalui surat himbauan untuk memberikan penegasan terkait yang harus di jalankan oleh ASN terkait dengan larangan kampanye tentang keterlibatan ASN. Kemudian, himbauan kepada peserta pemilu utamanya partai politik untuk tidak melibatkan ASN dalam kegiatan kampanye.

Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Kota Baubau Sarmin, S.Pd ketika ditemui di ruang kerjanya Kamis (4/1/2024).

Terkait mengenai

sanksi kepada ASN yang ditemukan terlibat dalam Pemilu dan Pilpres, Sarmin mengakui, Bawaslu dapat melakukan proses penanganan ASN yang kemudian jika dia terbukti melakukan pelanggaran maka Bawaslu merekomendasikan kepada KASN berdasarkan pemeriksaan Bawaslu yang kemudian KASN menindak lanjuti dalam bentuk penerapan sanksi kepada yang bersangkutan.

Sementara itu, untuk kondisi logistik Pemilu dan Pilpres khususnya surat suara, Bawaslu Kota Baubau menurut Sarmin, telah melakukan pengawasan ketat baik dalam aspek pembongkaran sampai pendistribusian di gudang KPU Baubau.

Dijelaskan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, belum ada potensi pelanggaran terkait dengan logistik KPU

terutama untuk surat suara. termasuk juga akan memastikan tidak ada kerusakan ataupun kekurangan. Kemudian dalam proses penyortiran KPU diharapkan melakukan dengan sebaik mungkin dengan cermat dan kehati-hatian sehingga surat suara yang akan di gunakan pada saat Pemilu nanti tidak terjadi kerusakan dan kalau terjadi kekurangan KPU segera berkoordinasi dengan KPU RI agar terpenuhi.

Sarmin berharap khusus peserta Pemilu partai politik memberikan edukasi menjaga proses demokrasi di Kota Baubau dengan baik serta sama-sama menjaga rangkaian demokrasi ini berjalan dengan tertib aman jujur dan adil sehingga pelaksanaan pilkada betul-betul mampu melahirkan pemimpin di Kota Baubau yang amanah. (*)

3 Ribu Aparat Gabungan Dikerahkan Jaga Debat Ketiga Pilpres Hari Ini

Laporan: Hasim

JAKARTA -- Polda Metro Jaya mengerahkan 3.041 personel gabungan untuk mengamankan acara debat ketiga rangkaian Pilpres 2024 yang digelar KPU di Istora Senayan, GBK, Jakarta Pusat, Minggu (7/1) ini.

Selain itu rekayasa lalu lintas (lalin) pun telah disiapkan Polda Metro Jaya untuk menjamin kelancaran acara debat ketiga Pilpres 2024 yang akan mempertemukan tiga capres kontestan tersebut.

“Untuk pengamanan kita kerahkan 3.041 perso-

nel gabungan,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri sekaligus Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/1).

Rincian ribuan aparat yang dikerahkan itu adalah terdiri dari 2.877 personel Polri (Satgaspus 727 personel, Satgasda 2.000 personel, dan Satgasres 100 personel), 120 personel TNI (TNI AD 100 personel dan POM AD 20 personel), serta 94 personel Pemda DKI (Satpol PP 40 personel, Dishub 35 personel, Derek 5 personel dan Damkar 14 personel).

“Pengamanan personel gabungan Polri, TNI dan Pemerintah Provinsi DKI, sesuai dinamika hakekat tugas fungsi sasaran pengamanan kegiatan Debat Capres Cawapres ke 3 melalui satgas Preemptif, Preventif, Humas dan Bantuan Operasi,” tutur Trunoyudo.

Trunoyudo menerangkan dari 12 pintu akses di kawasan GBK, beberapa di antaranya juga akan ditutup sebagian sebagai bagian dari pengamanan debat ketiga Pilpres 2024.

Pintu akses yang ditutup yakni pintu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, dan 12. Sedangkan untuk pintu 5 dan 8 hanya

APK Pemilu dan Pilpres Melanggar Segera Ditertibkan di Baubau



Bawaslu dan Pemkot Baubau gelar rakor penertiban APK yang melanggar

Pewarta: Amran

BAUBAU, BP-Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) di Kota Baubau segera dilakukan.

Hal ini menjadi salah satu poin kesepakatan dalam rapat koordinasi yang digelar Jumat sore (5/1/2024) bertempat di ruang rapat kantor Wali Kota Baubau Palagimata.

Rapat koordinasi persiapan penertiban pemasangan alat peraga kampanye yang dilaksanakan Pemkot Baubau dipimpin LM. Aswad, S.Sos, M.Si dalam kapasitasnya sebagai Ketua Desk Pemilu Kota Baubau, serta dihadiri Asisten III Setda Kota Baubau La Ode Darussalam, S.Sos, Plh. Kasdim 1413 Buton Mayor Arh. La Ode Mursali, Kasat Intel Polres Baubau

AKP La Ode Made, SH, Kepala sub bagian pembinaan Kejari Baubau Ismail Muda, SH, Ketua Bawaslu Kota Baubau Sarmin, S.Pd, Devisi Sosialisasi KPU Samsudin, Kakesbangpol Kota Baubau Drs. Muh. Muhammad Amaluddin, M.Si, Anggota Desk Pemilu Yusran Elfargani, SE, Kasat Pol PP Kota Baubau Drs. La Ode Muh. Takdir, M.Si dan Camat se Kota Baubau.

Beberapa poin yang menjadi kesimpulan rapat adalah, bahwa dasar hukum untuk melakukan penertiban APK telah terpenuhi. Sekretaris Kesbangpol menyusun jadwal tim bersama kepada

unsur TNI Polri dan Kejaksaan, lokasi penertiban terfokus pada lokasi yang diluar penempatan KPU termasuk fasilitas umum dan sarana ibadah. Jika ada somasi dari parpol terkait penertiban APK tentu menjadi tanggung jawab peserta rapat, Peran Camat dan Panwas-cam bergerak bersama membantu setelah menerima surat penyampaian tim bersama.

Kemudian, untuk mencegah protes dari Parpol maka penertiban APK dilakukan kesemua daerah dan terus berlanjut sesuai jadwal yang ditentukan. Dalam rangka

menjaga keharmonisan Bawaslu dan KPU agar kembali menyurati para parpol pada saat nanti akan melakukan penertiban APK.

Berkordinasi dengan dinas LH dan Dishub untuk mendukung sarana kendaraan, Khusus tempat hasil Pemilu Kecamatan Wolio dan Kadolokatapi menjadi tanggung jawab pemerintah dan APK hasil penertiban dikumpulkan sementara di Kantor Satpol PP Baubau.

Sementara itu, Kasatpol PP Kota Baubau Drs La Ode Muh Takdir M.Si ketika dihubungi melalui telepon selularnya mengungkapkan, hasil rapat koordinasi akan diadakan penertiban baliho. Namun masih menunggu tim Desk yang menyusun jadwal penertibannya. (*)

digunakan untuk akses keluar.

“Sedangkan untuk pintu 7 dan 10 digunakan untuk pintu akses masuk dan keluar,” ucap dia.

Lebih lanjut, Trunoyudo menuturkan Ditlantas Polda Metro Jaya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan GBK. Namun, penerapan rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional, tergantung pada kondisi dan situasi di lapangan.

Berikut rekayasa lalu lintas yang disiapkan Ditlantas Polda Metro Jaya:

1. Arus lalu lintas yang dari Jalan Gatot Subroto yang akan menuju ke Jalan Gerbang Pemuda diarahkan lurus ke Jalan Jenderal



Ilustrasi. Ada 3 ribu lebih aparat gabungan yang dikerahkan untuk menjaga keamanan dan kelancaran situasi saat debat capres malam ini.

Subroto arah Slipi 2. Arus lalu lintas dari arah Jalan Asia Afrika diarahkan lurus ke arah Jalan Hang Tuah Raya

3. Arus lalu lintas yang dari Bundaran Senayan yang akan menuju ke Jalan Pintu Senayan diarahkan lurus ke Jalan Jenderal

Sudirman. Debat yang digelar KPU di Istora Senayan itu akan mempertemukan tiga capres seputar tema: pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.

KPU pun telah menetapkan 11 pan-

elis yang menyusun pertanyaan buat para calon.

Selain itu, duo moderator yang akan memandu jalannya debat tersebut adalah jurnalis televisi dari MNC Group yakni Anisha Dasuki dan Ariyo Ardi. (*)

Ini Capaian Kinerja Pemprov Sultra Sepanjang Tahun 2023 Yang Dirilis Akhir Tahun

Pewarta: Mashuri

KENDARI, BP-Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Reviyanto, S.I.K., M.H, menggelar rilis akhir tahun 2023 lingkup Pemerintah Prov. Sultra, sebagai pertanggungjawaban publik, sekaligus sebagai momen yang tepat untuk mengukur capaian kinerja dan ucapan rasa syukur atas semua yang telah berhasil dicapai, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, (Minggu, 31 Desember 2023)

Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda Sultra, Staf Ahli Gubernur, Asisten 1 dan 2 Setda Sultra, Kepala Perangkat Daerah Sultra, Kepala Biro Setda Sultra, dan rekan-rekan insan pers

Arahan Pj. Gubernur Sultra menyampaikan bahwa ada 3 (tiga) aspek kinerja dengan 16 indikator yaitu Pemerintahan terbagi atas 6 (enam) indikator yaitu: pertama laksanakan urusan pemerintah daerah, kedua Pembinaan Pengawasan (Binwas) perangkat daerah Prov/Kab/Kota, ketiga pegang teguh/amalkan Pancasila, UUD NKRI 1945, keutuhan NKRI, keempat jaga etika dan norma untuk pemerintahan wewenang daerah, kelima kerjasama dengan Forkopimda dan instansi vertikal dan keenam lakukan wewenang lain

Untuk aspek pembangunan ada 6 (enam) indikator yaitu pertama tepat waktu susun dan ajukan Ranperda pertanggungjawaban APBD ke DPRD, kedua terapkan pemerintahan bersih dan baik, ketiga kelola APBD, keempat realisasi investasi bijak, kemudahan perijinan berusaha, kelima inovasi dan keenam penanganan tingkat pengangguran terbuka (TPT)

Kemudian kemasyarakatan ada 4 (empat) indikator yaitu: 1. Tenram dan tertib masyarakat, 2. Bagian Demokrasi: serap aspirasi dan tingkatkan partisipasi masyarakat, 3. Tindaklanjuti dan diselesaikan pengaduan masyarakat dan 4. bijak mitigasi, bencana, PMK, longsor, banjir dan kebakaran

Dalam rilis akhir tahun Pemprov. Sultra, berfokus kepada hasil dari kebijakan dan

langkah strategis terhadap 5 (lima) bidang kesejahteraan rakyat (kesra) sehingga meliputi pemenuhan hak-hak konstitusional rakyat yaitu:

1. Sandang, Pangan dan Papan
2. Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kesehatan, Pekerjaan dan Jaminan Sosial
4. Kehidupan sosial, perlindungan hukum dan ham
5. Infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik

Di dalam kelima hak konstitusional tersebut, menjadi marwah dan arah dalam perumusan kebijakan politik legislasi, anggaran dan politik pengawasan. Sehingga dalam pencapaian politik legislasi Pemerintah Provinsi bersama DPRD Sultra pada tahun 2023: yaitu pertama Perda APBD Perubahan tahun anggaran 2023, kedua Ranperda APBD tahun anggaran 2024, ketiga Ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan keempat Ranperda sistem Pemerintahan Daerah Prov.Sultra berbasis data desa/kelurahan presisi

Untuk Implementasi Perda APBD Perubahan tahun 2023, dengan berfokus 5 (lima) bidang Kesra dengan capaian: Sandang, Pangan dan Papan dibagi, menjadi 6 (enam) yaitu: pertama Gerakan Pangan Murah serentak di 17 Kab/Kota, kedua salurkan cadangan pangan beras kepada 250.516, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 17 Kab/Kota, ketiga salurkan 14.500 paket sembako seperti beras premium 5 Kg, Gula 1 Kg, Minyak Goreng 1 Liter di Kab.Mubar, Wakatobi, serta Kota Kendari dan Kota Bau-Bau, keempat tanam 2.738.485 bibit sayur mayor di Konawe oleh Pelajar se-Sultra, dapat rekor muri, kelima program desa Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) di Kab. Bombana dan Kab. Kolaka serta program B2SA Goes to School di 4 sekolah dasar Kota Kendari dalam rangka penanggulangan stunting dan keenam salurkan alat tangkap dan sarana budidaya rumput laut di 6 Kab/Kota

Kemudian, salurkan permakanaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu: pertama, 70 anak terlan-



tar dan remaja dalam panti di Kota Kendari dengan dukungan anggaran Rp. 826.000.000, kedua 90 Penyandang disabilitas di Kab. Muna dengan anggaran Rp. 96.000.000, ketiga 50 Gelandangan Pengemis di Kota Bau-Bau Rp.75.600.000, dan keempat 50 lansia di Kota Bau-Bau dengan anggaran Rp. 50.000.000

Program bagi petani yaitu: salurkan pupuk organik, herbisida, insektisida dan bibit jagung di Kab. Konawe dengan dukungan anggaran Rp. 127.000.000 dan salurkan sarana produksi pangan: pupuk organik cair dan pestisida di Kab. Konsel dengan dukungan anggaran Rp. 41.430.000

Selanjutnya, pertama pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebanyak 645 unit, dengan dukungan anggaran Rp. 32.500.000.000, yaitu 645 unit tersebar di 15 Kab/Kota, 549 unit yang selesai 1005 dan 96 unit proses pengerjaan (progress sampai dengan 75%), kedua Rehab Rutilahu, dengan dukungan anggaran Rp. 2.100.000.000 yaitu 140 keluarga penerima manfaat di Kab. Wakatobi dan Permensos Nomor 6/2021 tentang rehabilitasi rumah tidak layak huni dan ketiga Kab. Buton Utara tidak ajukan Rutilahu sehingga tidak dianggarkan

Untuk capaian Perda APBD Perubahan yaitu yang kedua, Pendidikan dan Kebudayaan yaitu 1. Dana dan Sarana Pendidikan yang pertama, disalurkan seperti Beasiswa 167 mahasiswa berprestasi yaitu: UHO, USN dan IAIN Kendari dengan anggaran Rp. 1.252.500.000, yang kedua Beasiswa 100 siswa SMA/SMK/SLB Berprestasi di

11 Kab/Kota dengan dukungan anggaran Rp. 150.000.000, ketiga Beasiswa berjumlah 2.194 siswa penerima manfaat SMA/SMK/SLB di 17 Kab/Kota dengan dukungan anggaran Rp. 2.194.000.000, keempat dana pendidikan 12 mahasiswa asal Konawe kuliah di UHO dan IAIN Kendari dengan anggaran Rp. 90.000.000 di Kab.Konawe dan kelima salurkan laptop 20 Guru SMA/SMK/SLB berprestasi di 10 Kab/Kota dengan dukungan anggaran Rp. 500.000.000

Lanjut, seragam berjumlah 1.712 siswa SMA/SMK/SLB yang kurang mampu di 9 Kab/Kota dengan anggaran Rp.684.800.000, peralatan laboratorium IPA SMA di 11 Kab/Kota dengan dukungan anggaran Rp. 8.196.400.000, ada juga Peralatan Utama SMKN/SMKS dengan dukungan anggaran Rp. 34.377.600.800 dan pembangunan SAR-PRAS dan UTILITAS: Pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, aula, pagar dan halaman SMA/SMK, Rehabilitasi Ruang Kelas, Ruang Guru, serta pemasangan lampu solar cell dengan dukungan anggaran Rp. 49.610.714.757

Selain itu, ada juga festival kebudayaan Wakatobi Waves pada tanggal 02 sampai dengan 06 November 2023 di Kab. Wakatobi dan Sultra Tenun Karnaval, tanggal 02 s/d 03 Desember 2023 di Kota Kendari. kemudian kegiatan kebudayaan lainnya ada Kongres Internasional ke-IV Bahasa-Bahasa Daerah, pada tanggal 21 November 2023, sehingga identifikasi 9 bahasa: ada 7 bahasa terancam punah, 1 kritis, 1 alami kemunduran, selanjut-

nya akan dilaksanakan revitalisasi bahasa daerah, dengan program awal revitalisasi bahasa tolaki, ada juga fasilitasi perlindungan hukum kekayaan intelektual dengan Ditjen Kemenkumham, salah satunya daftarkan 40 Kekayaan Intelektual Komunal Budaya Tolaki, selain itu ikuti istana berbatik tanggal 01 Oktober 2023 untuk mempromosikan tenun khas Sultra, terima gelar adat kesultanan Buton â€ˆMia Ogena Bhawaangi Yi Sulawesi Tenggaraâ€™ pada tanggal 17 Oktober 2023 dan terima gelar adat lembaga adat Tolaki â€ˆLanggai Mandarano Wuta Ndolaki Sulawesi Tenggaraâ€™ pada tanggal 21 Desember 2023

Perlu peningkatan layanan Puskesmas, menuju BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) di Kab. Konawe Kepulauan dengan anggaran Rp. 76.730.000, salurkan Dental unit pada Puskesmas Lepo-Lepo, Kota Kendari dan Puskesmas Tomdasi di Kab.Muna Barat dengan dukungan anggaran Rp.484.000.000, salurkan sumur BOR pada puskesmas Siompu, puskesmas Siompu Barat, Puskesmas Kadatua di Kab. Buton Selatan dengan dukungan anggaran Rp. 562.580.698 dan Operasionalisasi contohnya Laboratorium Layanan Katerisasi Jantung Rumah Sakit Oputa Yi Koo pada tanggal 23 Desember 2023, ada juga salurkan peralatan kewirausahaan, dana stimulus, serahkan nomor induk berusaha, salurkan pengembangan usaha, insentif dan pameran bursa kerja tahun 2023 dan jaminan sosial seperti saluran luran BPJS Ketenagakerjaan di Kota Kendari dan Kab. Muna Barat

Di Sultra untuk infla-

si sudah turun diangka 2.87, selain itu juga, dalam upaya akselerasi turunan stunting diperlukan intensifikasi koordinasi dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Prov/Kab/Kota dan pastikan Provinsi/Kab/Kota telah implementasikan sesuai dengan Renprogram penurunan stunting dengan langkah-langkah yaitu: intervensi spesifik dan intervensi sensitive dan selanjutnya upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, perlu penguatan komitmen kepala daerah Kab/Kota di wilayah Prov.Sultra, Penajamaan intervensi (program dan anggaran dengan pendekatan pemanfaatan data By Name, By Address dan Pemetaan Program/kegiatan berbasis spasial, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data desa/kelurahan presisi

Pada capaian kinerja Pemprov. Sultra Tahun 2023 yaitu:

1. Konsolidasi Pengadaan Aspal Buton UTK Katalog Elektronik Lokal Pertama kali untuk tingkat Provinsi LKPP pada tanggal 7 November 2023
2. Terbaik pertama, kategori wilayah pusat pertumbuhan industri Kemenperin tanggal 11 Desember 2023
3. Peringkat III, dalam Pembina Produktivitas Tenaga Kerja Kategori Kecil Kemnaker pada tanggal 1 Desember 2023
4. Rekor MURI Tanaman Holtikultura, 2,7 Juta Serentak oleh Pelajar SMA/SMK terbanyak Konawe pada tanggal 25 November 2023
5. Peringkat III, Anugerah Legislasi tahun 2023 kategori Pemerintah Daerah Prov. Sultra dari Kemenkumham tanggal 21 November 2023
6. Juara III, Peman-

faatan Mail Multidomain tingkat Pemprov dari Kemenkominfo pada tanggal 17 Oktober 2023

7. Mendapatkan 3 Piala yaitu Provinsi terbaik tingkat nasional yaitu BBWI (Bangga Berwisata di Indonesia dari Kemenkomarves pada tanggal 16 Desember 2023

8. kita juga masuk kategori Nominator Nirwasita Tantra 2023 1 dan 10 Provinsi yang dinilai KLHK

Selesai memberikan paparan, Pj. Gubernur Sultra mengucapkan selamat Natal Tahun 2023 dan selamat tinggal tahun 2023, sehingga semua yang terjadi di tahun 2023 menjadi bekal perbaikan menyongsong 2024. Selamat datang 2024 serta bersiaplah dengan jiwa pengabdian, Sultra Bangkit, Maju dan Sejahterah

Tahun 2024, jadikan tantangan bagi kita untuk lebih memperjuangkan sehingga semakin terwujudnya kesejahteraan rakyat. Tentu tidak mudah, namun akan dapat terlaksana, apabila kita memiliki komitmen moral serta rasa tanggungjawab dan dedikasi yang tinggi yaitu ada 3 (tiga) : pertama penegakan aturan, utamanya di jajaran birokrasi, kedua kesadaran pejabat public, selaku pelayan public yang memiliki disiplin dan tanggungjawab kepada tugas untuk melayani masyarakat dan ketiga sikap pesta demokrasi 2024 dengan netralitas seluruh ASN. (kata Pj. Gubernur Sultra)

Apresiasi dan terima kasih atas sinergitas positif pimpinan dan seluruh anggota DPRD, Forkopimda Tk.I, Instansi vertical dan stakeholder se-Sulawesi Tenggara, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, dan Tokoh Pemuda, segenap komponen masyarakat, rekan-rekan insan pers beserta seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara

Serta untuk resoliso 2024, Pemerintah Prov. Sultra, semakin berakhlak dengan bekerja cepat, tepat, ikhlas dan hasilnya akuntabel dan Sekda Sultra menyampaikan kinerja dalam 1 tahun terakhir dan terakhir Pj. Gubernur Sultra akan mengadakan doa akhir tahun di Masjid Agung Al-Kausah Kendari. tutupnya. (*)

Pj. Bupati Buka Pertemuan Publikasi Hasil Pengukuran Data Stunting 2023



Pewarta: Eron

BUSEL, BP-Penjabat (Pj) Bupati Buton Selatan, La Ode Budiman SKM M.MKes, yang juga selaku Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Buton Selatan membuka secara resmi Pertemuan Pengukuran dan Publikasi Data Stunting Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023 yang dilaksanakan di Gedung Lamaindo, Rabu (13/12/2023).

Turut hadir pada kegiatan tersebut Staf Ahli Bupati Buton Selatan, Para Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, Perwakilan Kodim 1413/Bataug, Kepala Instansi Vertikal, Para Camat, Para Kepala Puskesmas, serta yang terli-

bat dalam TPPS.

Dalam sambutannya, La Ode Budiman, berharap dengan adanya Publikasi Stunting ini dapat memperkuat komitmen dan kerjasama antara lintas sektor, pemerintah dan masyarakat dalam gerakan bersama menurunkan stunting di Kabupaten Buton Selatan.

“Saya berharap melalui pertemuan ini kita mendapatkan data-data yang akurat agar dapat mengidentifikasi permasalahan di setiap indikator aksi intervensi penurunan stunting,” harapnya.

Berdasarkan hasil pengukuran TPPS bulan Agustus 2023, Buton Selatan mengalami Penurunan prevalensi angka stunting sebesar 2,8% menjadi 24% dari tahun 2022 sebe-

sar 26,8%. Meskipun demikian penurunan Angka Stunting ini belum mencapai target Nasional yaitu 14% pada tahun 2024.

Olehnya itu La Ode Budiman, mengingatkan kembali penurunan stunting menjadi salah satu alat ukur daerah dalam meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan berharap melalui kegiatan tersebut dapat menumbuhkan semangat semua pihak untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Buton Selatan.

“Waktu kita sangat sedikit, tinggal satu tahun. Untuk itu, penurunan kasus stunting di Kabupaten Buton Selatan harus menunjukkan perubahan, jangan sampai justru meningkat,” tutupnya. (*)

Pemkab Buton Raih Penghargaan Kabupaten Peduli HAM



Pewarta: Rahman

BUTON, BP-Pemerintah Kabupaten Buton kembali meraih Predikat Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia (RI) Nomor: M.HH-03.HA.02.02-01 Tahun

2023 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Pada Tahun 2023.

Penghargaan diserahkan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D. bersama Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Prov. Sultra Silvester Sili Laba, S.H.

kepada Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, M.Si. di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Kamis, 28 Desember 2023.

“Hak asasi manusia (HAM) merupakan amanat konstitusi dapat dilihat dalam Bab X dalam UUD 1945 paling tidak terdapat 10 pasal yang mengatur ten-

Awal tahun 2024, Pj. Bupati Buton Sampaikan Arahan untuk Peningkatan Kinerja



Pewarta: Rahman

BUTON, BP-Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi memberikan pengarahan pada para Kepala OPD dan Perencana OPD Lingkup Pemkab Buton di Hari Pertama Kerja tahun 2024 di Aula Kantor Bupati Buton, Selasa, 2 Januari 2024.

Pertemuan tersebut dihadiri Sekda Buton, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kabag dan Perencana semua OPD.

Mengawali arahnya orang nomor satu di kabupaten Buton itu mengucapkan Selamat Natal bagi yang merayakan dan Selamat Tahun Baru 2024. “Semoga memasuki Tahun 2024 kinerja kita semua baik, semakin Amanah dan Ikhlas,” katanya.

Pj. Bupati juga mengatakan di awal tahun baru ini memasuki anggaran baru. Perjalanan selama tahun 2023 itu merupakan bahan evalu-

asi dan perbaikan untuk kedepannya. Pekerjaan dan semua pertanggungjawaban keuangan harus diselesaikan dengan baik.

Dikatakannya, pemerintah harus fokus sasaran utama pemerintah dengan tidak mengesampingkan urusan lain yakni pengendalian inflansi, penurunan prevalensi angka stunting, dan kemiskinan ekstrim.

Sekwan DPRD Provinsi Sultra ini juga menegaskan pada ASN untuk bekerja dengan benar sesuai aturan dan menjalankan tugasnya sesuai keahlian di bidang masing

masing, sesuai tugas yang dibebankan, dan sesuai dengan amanah yang diemban untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Buton.

“Mari tingkatkan sinergitas, saling bahu membahu, saling berkoordinasi untuk melaksanakan pekerjaan untuk kebaikan bersama dalam memajukan pembangunan di Kabupaten Buton,” katanya.

Kepala Daerah Aspal Alam Terbesar di dunia ini juga mengharapkan agar apartur di kabupaten Buton juga meningkatkan disiplin termasuk menempati

rumah-rumah dinas yang telah disediakan. ASN utamanya para Kepala OPD harus tinggal di Pasarwajo.

Sekda Buton, Asnawi Jamaluddin, SPd, MSi pada kesempatan itu juga mengajak para ASN untuk terus meningkatkan disiplin, termasuk disiplin berpakaian.

Sebagai ketua TPPS Kabupaten Buton, Sekda menegaskan akan melaksanakan rapat koordinasi evaluasi kinerja Tim dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Buton.

“Terima kasih verifikasi angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Buton, sehingga pada tahun 2024 ini angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Buton sampai pada angka Nol,” katanya. (*)

tang hak asasi manusia, yaitu mulai dari pasal 28A sampai dengan 28J, yang menegaskan bahwa P5 HAM yaitu penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia itu menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah,” kutip Sekda Prov. Sultra saat membaca sambutan Pj. Gubernur Sultra.

Sekda Sultra menyampaikan terkait dengan implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 22 tahun 2021 tentang kriteria Kabupaten Kota Peduli HAM, bahwa berdasarkan hasil pemantauan usul penilaian kriteria kabupaten/kota Keduli HAM tahun 2023 dari 17 kabupaten/kota lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara yang

telah menyampaikan usul penilaiannya hanya 15 kabupaten/kota.

“Dari 15 kabupaten/kota yang mengusul penilaian kriteria peduli HAM, ada 10 kabupaten/kota yang memenuhi kriteria Kabupaten Kota Peduli HAM, yaitu Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat,” jelasnya.

Selaku Sekda atas nama Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat dan sukses, atas pencapaian prestasi yang sangat membanggakan ini kepada para bupati/wali kota yang telah

berhasil meraih predikat sebagai kabupaten/kota Peduli HAM.

“Tentunya dengan adanya penghargaan ini, kita jangan cepat berpuas diri terus melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan langkah-langkah nyata, dalam mewujudkan terpenuhinya hak-hak konstitusional sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sandang, pangan, dan papan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan lima jaminan sosial, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, infrastruktur, dan lingkungan hidup,” ucapnya.

Sekda berharap, semoga pada tahun yang akan datang, seluruh pemerintah Kabupaten Kota di Sulawesi Tenggara serta

pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat memenuhi kriteria Kabupaten Kota, peduli hak asasi kemanusiaan.

Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi pada kesempatan itu menyampaikan terimakasih pada semua pihak sehingga Buton ditetapkan sebagai kabupaten Peduli HAM.

“Penghargaan ini bukan hanya sekadar piagam, tetapi merupakan penghargaan dalam bentuk kerja nyata yang telah dilakukan Pemkab Buton, terkait perlindungan Ham di Kabupaten Buton,” pungkas Pj. Bupati Buton.

Di acara yang sama juga dirangkaikan dengan pengukuhan Satuan Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara. (*)

Integrasi Aplikasi SIPLah dan ARKAS Kemendikbudristek Semakin Tingkatkan Akuntabilitas Sekolah



Laporan: Warman

JAKARTA-Hari Antikorupsi Dunia (Hakordia) 2023 mengangkat tema “Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju”. Dalam peringatan tersebut, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyampaikan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena dilakukan secara sistemik, kompleks, dan terencana oleh penyelenggara negara. Digitalisasi birokrasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu aksi dalam pencegahan korupsi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berhasil memperoleh predikat sangat baik dengan indeks 3,86, dari angka maksimal 4,0, berdasarkan hasil pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2022.

Dalam Laporan Dampak Peran Teknologi dalam Transformasi Pendidikan Indonesia yang dilakukan Oliver Wyman dalam risetnya melaporkan bahwa sebanyak 84% responden menyadari kemampuan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) mampu menyederhanakan proses dan menghemat waktu untuk tata kelola administrasi keuangan sekolah. Selanjutnya, sebanyak 70% responden menyatakan bahwa Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) mampu memberikan efisiensi dalam mempercepat proses pencarian produk yang relevan.

“Pada tahun 2023 Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah telah melakukan penyempurnaan aplikasi ARKAS 4.0 dengan tiga keunggulan. Pembaharuan ini membuat ARKAS lebih praktis dengan sudah terintegrasi pada SIPLah, lebih nyaman dengan tampilan yang sederhana dan terstruktur, serta dilengkapi dengan notifikasi eror dalam penggunaannya,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah,

Praptono dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) bertajuk “SIPLah dan ARKAS Tingkatkan Akuntabilitas Sekolah” yang disiarkan melalui kanal Youtube KEMENDIKBUD RI, pada Kamis, (21/12).

Lebih lanjut, Praptono melaporkan bahwa tahun ini 218.898 satuan pendidikan penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan 12,26% satuan pendidikan penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sudah menggunakan dan beralih ke ARKAS versi 4.0. Sementara itu, tercatat 68,32% satuan pendidikan penerima BOS dan 38,85% satuan pendidikan penerima BOP sudah menggunakan SIPLah. “Kemendikbudristek juga telah melakukan riset kepuasan pelanggan di tahun 2023. Riset tersebut membuktikan bahwa 80,99% pengguna merasa puas dalam menggunakan kedua aplikasi tersebut. Inovasi yang dihadirkan dinilai mampu memberi kemudahan serta kenyamanan untuk guru dan kepala sekolah dalam mengelola dana BOS dan BOP,” pungkash Praptono.

Selanjutnya, Praptono berharap pada tahun 2024 seluruh satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah sudah dapat menggunakan kedua aplikasi tersebut. “Sejatinya

ARKAS dan SIPLah menjadi cara Kemendikbudristek untuk mengoptimalkan tugas guru dan kepala sekolah dalam memberikan pengajaran kepada peserta didik dan meningkatkan akuntabilitas sekolah,” ucap Praptono.

Dampak positif penggunaan kedua aplikasi tersebut diungkap oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah, Teddy A.H. Salampessy. Ia mengatakan bahwa sejak tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah telah berkomitmen untuk secara perlahan mengimplementasikan penggunaan ARKAS dan SIPLah. Dalam pemanfaatannya, kedua aplikasi tersebut telah membantu sekolah dan dinas pendidikan, salah satunya dalam praktik Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). “Transformasi digital ini wajib kita dampingi, sehingga proses pemanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh satuan pendidikan, khususnya di Maluku Tengah,” pungkash Teddy.

Teddy menambahkan, sebagai Kepala Dinas wajib untuk mendukung pemanfaatan aplikasi yang

Bangun Kolaborasi Budaya antar Gen Z, Kemendikbudristek Kemas Temu Karya SMK Seni Se-Indonesia



Laporan: Warman

JAKARTA- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan Temu Karya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Seni se-Indonesia di Taman Candra Wilwatikta, Pasuruan, Jawa Timur, yang dimulai dari tanggal 19 hingga 23 Desember 2023.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan, Hilmar Farid, mengungkapkan bahwa kegiatan temu karya ini merupakan salah satu wadah bagi para siswa dan sekolah untuk dapat berkolaborasi dan membangun jejaring.

“Jika kita membicarakan kebudayaan, para pelajar dan sekolah menjadi aktor dan institusi yang sangat penting dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan. Untuk itu kita perlu memperbanyak ruang-ruang kolaborasi dan interaksi untuk menggali

kreativitas dari nilai-nilai budaya dan tradisi untuk mereka. Apalagi SMK Seni, yang corenya adalah budaya itu sendiri,” ujar Dirjen Hilmar di Jakarta, Sabtu (23/12).

Temu Karya SMK Seni se-Indonesia diikuti oleh SMK Negeri 12 Surabaya, SMK Negeri 1 Kasihan Yogyakarta, SMK Negeri 8 Surakarta, SMK Negeri 3 Sukawati, SMK Negeri 10 Bandung, SMK Negeri 2 Gowa, SMK Negeri 7 Padang, SMK Negeri 57 Jakarta, dan SMK Negeri 3 Banyumas. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah sebagai ajang pertukaran informasi dan wacana agar dapat bersaing di kancah internasional, ruang apresiasi seni, terdokumentasinya catatan tari dan musik, menstimulus pembuatan karya kreatif, memupuk toleransi antar budaya, dan menarik minat generasi Z terhadap seni dan budaya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Abing Santoso, Guru Seni Tari SMK Negeri 12 Surabaya, sekaligus

menjadi direktur artistik kegiatan Temu Karya ini menjelaskan bahwa menjadi tantangan sendiri untuk memandu kolaborasi sekitar 153 pelajar dari 9 sekolah. “Saya senang dan bangga melihat antusias anak-anak walaupun harus beradaptasi dan mengikuti jadwal kegiatan yang cukup padat. Mungkin ini kali pertama bukan hanya bagi mereka, tetapi juga SMK Seni se-Indonesia untuk bisa berkumpul dan saling berinteraksi dalam kegiatan semacam ini,” ucap Abing.

Lebih lanjut, ia turut mengapresiasi semangat generasi muda yang melestarikan seni budaya melalui media sosial. “Media sosial menjadi salah satu ruang aktualisasi yang dekat dengan generasi muda saat ini, dan itu adalah ruang kita untuk melestarikan budaya di era digital ini. Karena itu kami menisipkan kegiatan pembuatan konten seni berkolaborasi dengan para siswa,” tutur Abing yang juga aktif sebagai content creator budaya. (*)

telah disediakan oleh Kemendikbudristek dan juga terus melakukan pendampingan di satuan pendidikan. “Sekolah bukanlah perusahaan akuntansi, untuk itu kita harus menjadi pelopor pemanfaatannya dan memastikan laporan keuangan Pemerintah Daerah bersumber dari aplikasi ARKAS dan SIPLah,” terang teddy.

Senada dengan Teddy, praktik baik dari kedua aplikasi itu juga dirasakan oleh Kepala Sekolah SMAN 2 Konawe Selatan, Safari. Dalam paparannya saat webinar,

Safari mengatakan bahwa dampak dari ARKAS dan SIPLah sangat besar bagi sekolah dengan memberikan kemudahan untuk melakukan perencanaan, penata usahaan, dan pelaporan. “Peningkatan integrasi ARKAS dengan SIPLah ini semakin menambah kemudahan bagi kami khususnya dalam membuat perencanaan yang dahulu memerlukan waktu yang lama untuk validasi, kini menjadi lebih cepat dengan sistem digital,” ucap Safari.

Kendati demikian, Safari juga mengajak kepada seluruh

Kepala Sekolah untuk memanfaatkan dan menggunakan ARKAS dan SIPLah dalam menunjang pengelolaan di satuan pendidikan. “Dengan memanfaatkan kedua aplikasi itu saya merasa kita juga mendukung perwujudan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengelolaan sekolah yang baik diharapkan juga mampu meningkatkan literasi, numerasi, dan menumbuhkan karakter baik para pelajar untuk menjadi generasi emas Indonesia,” tutup Safari. (*)

Baubau Post
 Kritik, Lugas, Independen
 Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik
 Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post
 Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

Pemimpin Umum : Fauzan NWA
 Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi
 Redpel : Hengky TA
 Korlip : Hengky T.A
 Redaktur : Alyakin, Kasrun
 Reporter : R a h m a n , ,mashuri, Jaya, Azis, , Lisma

Layouter : Ririn
 Pracetak : Aditya
 Cetak : Jamal

Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau
 Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com
 Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

Penerbit : PT. Faren Grafika
 Komisaris : Erna Agule
 Direktur Utama : Andina Latief, SKM
 Manager Keuangan dan Pemasaran : Nabila D.A
 Manager Iklan : Fauzan
 Kepala Sirkulasi : Jamal
 Administrasi : Salvana
 Security :

Kepala Biro Wakatobi : Risman
 Kepala Biro Buton Utara : Fauzan
 Kepala Biro Buton : Rahman
 Kepala Biro Busel : Salvana
 Kepala Biro Buteng : Andini
 Kepala Biro Bombana :
 Kepala Biro Sultra :
 Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr
 Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,
 Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul

Baubau : Jaya
 Agen Pasarwajo :
 Agen Butur : Samrihan

Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan,
 Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,
 Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Paket 55 Kue Campur Ganja Medan Disita di Sulsel, Pesan dari IG



Laporan: Hamid

MAKASSAR -- Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan bersama Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) menyita paket kiriman yang berisi 55 keping kue yang dicampur dengan ganja.

"Iya betul, kami join operation [dengan Bea Cukai Sulbagsel]," kata Kepala Seksi Intelijen BNNP Sulsel Syahril Said, Sabtu (6/1).

Dalam pengungkapan tersebut, pihaknya juga menangkap dua orang pria yang memesan barang haram tersebut dari Medan.

"Barangnya dari

Medan dikirim ke Makassar. Ada dua orang yang kita amankan," ungkapnya.

Mereka memesan 55 keping kue yang dicampur dengan ganja tersebut lewat salah satu akun di Instagram.

"Kedua pelaku yang diamankan ini statusnya sebagai mahasiswa," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Brigjen Pol Guruh Ahmad Fadianto menyebut bahwa pihaknya berhasil mengungkap modus peredaran narkotika jenis ganja yang dicampur dengan bahan kue yang menyasar anak-anak.

"Modusnya itu dibuat seperti kue cookies kalau dilihat ditaruh di lembaran foil biar tidak kelihatan, kemudian yang sasarannya itu anak-anak dan itu yang perlu kita selamatkan," kata Guruh usai memusnahkan narkotika di kantor BNNP Sulsel, Rabu (20/12).

Barang haram tersebut, terang jenderal polisi bintang satu ini berasal dari Medan, Sumatra Utara, yang dikirim ke Makassar dengan menggunakan jasa pengiriman.

"Jadi ini pengiriman dari Medan yang dikirim di sini," ungkapnya.

(*)

Wayan Koster Diperiksa Polda Bali 3 Jam Terkait Kasus Korupsi

Pewarta: Alwan

JAKARTA-- Mantan Gubernur Bali Wayan Koster diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Bali terkait kasus dugaan korupsi, pada Rabu (3/1).

Kabid Humas Polda Bali Kombes Jansen Aviatu mengatakan Wayan diperiksa selama tiga jam dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus korupsi tersebut.

"Pemeriksaannya pagi dari sekitar jam 9 dan 10 (pagi). Kalau dari informasi kawan-kawan Ditreskrimsus sekitar tiga jam (diperiksa)," ujarnya kepada wartawan di Mapolda Bali, Jumat (5/1).

Kendati demikian Jansen masih enggan menjelaskan lebih lanjut ihwal materi

pemeriksaan yang dialami penyidik terhadap Ketua DPD PDIP Bali tersebut. Ia juga mengaku masih belum bisa menjelaskan kasus dugaan korupsi yang menyeret Koster.

"Untuk lebih jelasnya, kalau nanti saya dapat data kita informasikan. Untuk Bapak Koster, intinya benar dilakukan pemeriksaan tanggal 3 Januari 2024 dalam rangka klarifikasi dan sedang didalami," katanya.

Jansen juga tidak menjawab secara pasti apakah kasus dugaan korupsi tersebut terkait proyek pembebasan lahan Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk.

"Untuk kebenarannya, nanti kita koordinasikan kembali dengan Ditreskrimsus. Karena, Bapak Direktur krimsus

sudah mengatakan, nanti kalau lengkap semuanya nanti diinformasikan ke rekan-rekan," ujarnya.

Sebelumnya, Wayan Koster tidak banyak merespons saat dirinya ditanya terkait pemeriksaan kasus dugaan korupsi.

"Tidak ada statement dulu, jangan dulu nanti cari waktu lain deh, nanti saja," kata Koster saat ditemui di Kantor DPD PDIP Bali, Kamis (4/1).

Koster juga tak ingin berspekulasi soal pemeriksaan dirinya itu berkaitan dengan Pemilu 2024. Ia meminta semua pihak tak asal menuduh soal dirinya dikriminalisasi.

"Jangan kita menuduh begitu, enggak boleh, enggak boleh," ujarnya.

(*)

Polisi Amankan 5 Orang dalam Kasus Pengiriman 226 Anjing ke Solo



Sebanyak 226 ekor anjing dikirim ke Solo, Jawa Tengah menggunakan truk.

Laporan: Hadi

JAKARTA-Polrestabes Semarang berhasil mengamankan 5 terduga tersangka dalam kasus pengiriman 226 ekor anjing ke Solo, Jawa Tengah.

Kapolrestabes Semarang Kombes Polisi Irwan Anwar mengungkapkan kelima orang tersebut dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Irwan menjelaskan, polisi saat ini sedang mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman 226 ekor anjing tersebut.

Sebelumnya, polisi yang mendapatkan informasi dari komunitas Animal Hope Shelter Indonesia, langsung bergerak dan mengadangi sebuah truk yang akan masuk ke Gerbang Tol Kalikangkung Semarang pada Sabtu (6/1) sekitar pukul 22.30 WIB.

Polisi mendapati ratusan ekor anjing hidup diikat tali rafia dan dimasukkan ke dalam karung, bahkan se-

bagian digantung terikat di bak truk itu tersebut.

"Kami dapat informasi dari rekan-rekan, langsung bergerak dan berhasil mendapatkan truk yang mengangkut ratusan ekor anjing. Dari hasil pemeriksaan sementara, mereka dari Subang akan dibawa ke Solo. Ini masih kita dalam," ucap irwan.

Ketua Animals Hope Shelter Indo-

nesia Christian Josua Pale menyebut pihaknya sudah mengendus sebuah truk yang mengangkut anjing ke Solo pada 23 Desember 2023 di Tol Cikopo Palimanan, namun truk tersebut langsung tak terdeteksi keberadaannya.

"Terima kasih sekali kepada Polrestabes Semarang, diberi info langsung gerak cepat. Rasanya pengen nangis ini. Lihat kondisi anjing-anjing itu diikat tali mulut leher kaki terus digantung," ujar Christian. (*)

Dua Tersangka Kasus Suap PBJ di BTP Bandung Segera Disidang

Laporan: Alwan

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan penyidikan kasus dugaan suap di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Bandung dengan tersangka Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU) Asta Danika dan Direktur PT Putra Khairisma Sejahtera (PKS) Zulfikar Fahmi.

Pada Kamis (4/1), tim penyidik KPK telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada tim jaksa.

"Tim jaksa menilai pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik telah memenuhi syarat formil dan materiel sehingga dinyatakan lengkap," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (5/1).

Ali mengatakan penahanan para tersangka dilakukan selama 20 hari di bawah we-

wenang tim jaksa. "Selanjutnya segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor dalam waktu 14 hari kerja," kata juru bicara belatar belakang jaksa tersebut.

Dalam proses penyidikan akhir, tepatnya Rabu (3/1), tim penyidik KPK memeriksa tiga orang saksi dan mendalami pemberian sejumlah uang dalam bentuk imbalan atau fee dari tersangka Asta Danika dan Zulfikar Fahmi ke beberapa pihak lain.

Para saksi yang diperiksa yaitu ASN/Pejabat Pembuat Komite (PPK) pada BTP Semarang Taofiq Hidayat S dan Albertus Dito Migrasto serta Eko Rahadi Nurtanto selaku ASN/PPK BTP Kelas I Jakarta.

Kasus ini bermula saat Asta Danikadan Zulfikar Fahmi kembali ingin dinyatakan sebagai pemenang lelang proyek yang diadakan Kementerian

Perhubungan (Kemhub) khususnya di BTP Kelas I Bandung.

Supaya perusahaannya menang, Asta dan Zulfikar mendekati Syntho Pirjani Hutabarat yang saat itu menjabat PPK dari paket besar kegiatan surat berharga syariah negara (SBSN) di BTP Kelas I Bandung pada Satuan Kerja Lampegan-Cianjur untuk proyek peningkatan jalur kereta api Lampegan-Cianjur tahun 2023-2024.

Paket pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Syntho di antaranya peningkatan jalur KA R 33 menjadi R 54 KM 76+400 s/d 82+000 antara Lampegan-Cianjur tahun 2023-2024 dengan nilai paket pekerjaan Rp41,1 miliar.

Tindakan Syntho untuk mengondisikan calon pemenang lelang disebut atas sepengetahuan dan arahan Direktur Prasarana Perkeretaapian

Harno Trimadi.

"Terjadi kesepakatan antara AD [AstaDanika] dan ZF [Zulfikar Fahmi] dengan SPH [Syntho Pirjani Hutabarat] agar dapat dimenangkan dengan adanya pemberian uang," ungkap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron beberapa waktu lalu.

Penyerahan uang kepada Syntho disebut dilakukan melalui beberapa kali transfer antar-rekening bank.

"Besaran uang yang diserahkan AD [Asta Danika] dan ZF [Zulfikar Fahmi] sejumlah sekitar Rp935 juta dan tim penyidik masih akan terus melakukan pendalaman," kata Ghufron.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (*)

Mulai Januari 2024, Kelurahan se-Kota Baubau Berlomba di Arisan Bersih



Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Baubau, Ibu Reffiani Dwiatmo

Pewartar: Amran

BAUBAU, BP-Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Baubau, Ibu Reffiani Dwiatmo menginisiasi sebuah program untuk mendorong kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Mulai bulan Januari 2024, 43 kelurahan di Kota Baubau akan dilibatkan dalam program yang disebut arisan bersih, dan pemenangnya akan diumumkan setiap minggu.

Penilaian atas arisan bersih ini akan dilakukan tim PKK Kota Baubau yang dipimpin langsung Ibu Reffiani Dwiatmo di setiap wilayah, dengan kriteria utama penilaian adalah kebersihan. "Kota Baubau harus bersih, dan ide arisan bersih ini diharapkan dapat memotivasi warga untuk membersihkan dan menjaga kebersihan yang sudah ada. Mengapa disebut arisan, harapannya adalah

semua wilayah masing-masing akan memperoleh predikat bersih dan akan membuat kota Baubau ini benar-benar bersih," jelas Ibu Reffiani. Mekanisme penilaian kebersihan wilayah kelurahan akan dilakukan oleh TP PKK Kota Baubau, termasuk reward yang diberikan tengah dirumuskan dan akan segera disampaikan dalam waktu dekat. (*)

Aplikasi Daftar Kehadiran Simalape Berbasis Android Mulai Running 2 Januari 2024 di Baubau



Asisten III Setda Baubau La Ode Darussalam bersama Infokom Zomm bersama Pj Walikota Baubau Dr Rasman Manafi membahas aplikasi Simalape

Pewartar: Amat Jr

BAUBAU, BP-Aplikasi kinerja milik Pemkot Baubau yang awalnya bernama Sipolima kini diupgrade menjadi Simalape. Sosialisasi aplikasi Simalape dipimpin Asisten III Setda Kota Baubau La Ode Darussalam, S.Sos, M.Si mewakili Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si via zoom dan diikuti oleh seluruh kepala OPD, Camat dan Kepala Puskesmas Kamis (28/12/2023).

Aplikasi berbasis android yang lebih lengkap dibanding versi sebelumnya ini akan mulai dijalankan pada 2 Januari 2024.

Menurut Darussalam, Pemkot Baubau kini tengah mensosialisasikan aplikasi Simalape yang merupakan pergantian dari aplikasi Sipolima yang menjadi daftar kehadiran melalui aplikasi Simalape. "Dan hari ini kami sampaikan kepada bapak ibu sekalian bahwa aplikasi ini akan mulai digunakan per tanggal 2 Januari 2024 kita semua sudah menggunakan aplikasi Simalape dan sekaligus meninggalkan aplikasi Sipolima,"ujarnya.

Ditambahkan, beberapa hal yang mendasar dalam aplikasi ini akan dijelaskan oleh teknisinya. Untuk itu, kepada kepala OPD, Sekdin ataupun Admin kiranya sama-sama perhatikan apa yang disampaikan narasumber dan apabila ada hal-hal yang kurang jelas dipertanyakan

sedetail mungkin.

Meski demikian Kominfo membuka kesempatan pertemuan koordinasi setelah pelaksanaan zoom.

"Sekali lagi kami sampaikan Kominfo juga tetap memberikan informasi apabila ada yang hal tidak jelas melalui zoom kita pada pagi hari ini. Dan kita harapkan zoom pagi ini diikuti oleh semua Camat, Lurah, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah dan Guru P3K juga PDAM yang sudah masuk pada aplikasi Simalape,"ungkapnya.

Kadis Kominfo H Andi Hamzah Machmud, SH, M.Si menegaskan, tanggal 1 Januari 2024 Sipolima tidak lagi aktif dan tanggal 2 Januari 2024 Simalape yang aktif atau running.

Dijelaskan, penggunaan aplikasi Sipolima ke Simalape tentu ada beberapa hal yang di dasari yakni ada beberapa yang mendownload aplikasi Sipolima di play store sudah

tidak bisa di download ini kendala dari sisi aplikasi itu salah satu hal yang diperbaiki dengan adanya Simalape.

Disamping itu, aplikasi Simalape itu ada penyesuaian fitur baru yaitu, tampilan awal aplikasi dan integrasi Facebook.

"Tentu persoalan-persoalan tersebut yang akan kita tampilkan di Simalape yang di sampaikan oleh teknisi aplikasi Simalape ini sudah sesuai dengan kebijakan PlayStore sudah ada izin resmi di PlayStore dan penggunaannya juga tentu bukan lagi sesuatu yang ada kendalanya dan kami tentu bertanggung jawab ada hal dari seluruh pegawai tidak bisa mendownload aplikasi simalape di PlayStore,"tegasnya. (*)

BLUD RSUD Baubau Raih Akreditasi Paripurna

Pewartar: Amran

BAUBAU, BP-Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Baubau berhasil meraih akreditasi Paripurna. Rumah Sakit milik Pemkot Baubau ini meraih predikat tertinggi pada penilaian yang dilakukan oleh Damar Husada Paripurna (LARS DHP).

Kepala Balai Layanan Umum Daerah dr. Sadly Salman. S.POG ketika ditemui di ruang kerjanya Jumat (29/12/2023) membenarkan jika RSUD Kota Baubau mendapatkan Akreditasi tingkat Paripurna dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 23 Desember 2023. Dan penilaian akreditasi paripurna ini berlaku sampai dengan 21 Desember 2027.

Menurut dr Sadly Salman, persiapan akreditasi ini menuju paripurna ini sudah mulai dilakukan dari tahun 2022. Ada 16 poin akreditasi yang diminta oleh lembaga akreditasi yaitu ten-



tang perbaikan sarana prasarana harus sesuai standar, kinerja pemberian asuhan dan perawatan medis harus sesuai standar, administrasi alur pasien dan mutu. "Sebenarnya barang lama tetapi memang harus diatur supaya mutunya benar-benar standar. Misalnya kita melayani dari depan sampai pasien pulang

itu harus standar. Jadi pelayanan di RSUD Baubau sama, di Si-loam sama, di Kendari sama, di Jakarta sama. Namun itu diatur oleh mutu namanya. Mutu itu hubungannya nanti sama tingkat kepuasan masyarakat (pasien). Mutu ini ada macam-macam yang dinilai oleh lembaga akreditasi. Ada Mutu Nasional, misalnya frekue-

nsi pemakaian tempat tidur, lamanya orang dirawat, atau misalnya ada kejadian kejadian pasien terjatuh atau pasien gawat tapi listrik padam dan tidak ada genset. Nah itu angka angka itu yang tidak boleh terjadi. Itu Mutu Nasionalnya,â€ujarnya.

Ditambahkan, selain Mutu Nasional, Rumah Sakit tersebut harus memiliki keunggulan. Dimana RSUD Kota Baubau memiliki perawatan Neonatal Intensive Care Unit (NICU) yang mengkhususkan diri dalam perawatan bayi baru lahir yang sakit atau prematur. Ini yang diunggulkan karena ditempat lain belum punya. Sehing-

ga, disitulah nanti mutunya dilihat tingkat kepuasan pasiennya, lamanya perawatan, ketersediaan obat. Selain itu juga ada Mutu Unit. Mutu Unit contohnya ada pasien di IGD. Ketika pasien sudah masuk dalam waktu 10 menit sudah dilayani, begitu juga di kamar operasi begitu ada pasien yang rencana operasi itu tidak boleh ada yang batal harus sesuai jadwalnya.

Lebih lanjut dijelaskan, pasca akreditasi Paripurna ini terlaksana maka kedepannya akreditasi ini adalah dasar yang akan diambil untuk ijin RSUD Kota Baubau bekerjasama dengan BPJS. Karena BPJS tidak

mau bekerjasama dengan Rumah Sakit yang belum terakreditasi. Sehingga akreditasi paripurna menjadi target agar BPJS makin yakin bahwa RSUD Kota Baubau mampu melayani pasien-pasien anggota BPJS. Apalagi sekarang hampir 90% pasien RSUD adalah anggota BPJS. Selanjutnya Kementerian Kesehatan juga akan melihat RSUD Baubau dengan nilai plus karena Rumah Sakit yang telah paripurna.

Kemudian dengan adanya akreditasi paripurna maka RSUD Kota Baubau menjadi Rumah Sakit pendidikan bagi Universitas Dayannu Ikhsanud-

din (Unidayan) dan kalau RSUD Baubau terakreditasi itu akan menjadi nilai tambah buat Unidayan agar mereka lebih diakui oleh Dikti, Kementerian Kesehatan, oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebab mampu mendidik dokter-dokter karena dididik oleh Rumah Sakit yang terakreditasi Paripurna. Disamping itu, dengan akreditasi paripurna maka kalau RSUD Baubau ingin naik kelas kemungkinan besar dari Dinas Kesehatan Provinsi akan menilai bahwa RSUD Baubau sudah layak untuk naik kelas dengan predikat akreditasi yang Paripurna. (*)